

ABSTRAK

Hakim, Hakiki Sulthan Rahman. 2021. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pengawasan Pembayaran Retribusi Sektor Pariwisata Berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Skripsi. Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember. Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Retribusi, Jasa Usaha, Kebijakan Pemerintah, Pariwisata

Pemerintah Daerah dalam pengawasan pembayaran retribusi sektor pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dilakukan dengan cara memantau keaktifan pengelola pariwisata dalam pembayaran retribusi kepada kas Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember yang dibayarkan langsung oleh kepala pengelola tempat pariwisata dengan mengisi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan membawa formulir ke tempat pembayaran yang ditunjuk yaitu Bank JATIM, kemudian Bank Jatim melaporkan hasil dari pembayaran retribusi Pariwisata ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dinas Priwisata dan Kebudayaan di beri wewenang untuk menindak pengelola pariwisata yang tidak membayarkan retribusi kepada Kas Daerah berupa surat teguran, sangsi administrasi berdasarkan hasil wawancara sedangkan untuk sangsi pidana berdasarkan Pasal 79 PERDA Kabupaten Jember No. 5 Tahun 2011 yang berisikan “Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar”

ABSTRACT

Hakim, Hakiki Sultan Rahman. 2021. Jember Regency Government Policy in Supervising the Payment of Retribution for the Tourism Sector Based on the Jember Regency Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to the Jember Regency Regional Regulation Number 5 of 2011 concerning Business Service Retribution. Thesis. Legal Studies Program, Faculty of Law. Muhammadiyah University of Jember. Menik Chumaidah, S.H., M. Hum.

Keywords: Retribution , Business Services, Government Policy, Tourism

Local government in supervising the payment of retribution for the tourism sector by the Regional Government of Jember Regency, is carried out by monitoring the activity of tourism managers in paying levies to the regional treasury carried out by the Regency Tourism and Culture Office. Jember which is paid directly by the head of the tourism place manager by filling in the Regional Retribution Deposit Letter (RRDL) as proof of payment or deposit of levies that have been made by bringing the form to the designated payment place, namely Bank JATIM, then Bank Jatim reports the results of the payment of Tourism levies to the Agency Regional Revenue. The Department of Tourism and Culture is given the authority to take action against tourism managers who do not pay levies to the Regional Treasury in the form of a letter of warning, administrative sanctions based on the results of interviews, while for criminal sanctions based on Article 79 of the Regional Regulation of Jember Regency No. 5 of 2011 which contains "Mandatory levies who do not carry out their obligations so that they are detrimental to regional finances are threatened with imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine of a maximum of 3 (three) times the amount of retribution owed which is not or underpaid"